

SISTEM KEKERABATAN PADA PRAKTIK POLITIK DI DESA BUNGUR (KAJIAN SOSIOLOGI POLITIK)

KINSHIP SYSTEM IN POLITICAL PRACTICE IN BUNGUR VILLAGE (STUDY OF POLITICAL SOCIOLOGY)

Teresiany Wulan Gultom

Universitas Negeri Surabaya

*E-mail: teresianywulan.21065@mhs.unesa.ac.id

Abstract

Kinship relations can influence the system of government and political practices in each region which run in harmony with their respective functions. Each region has a leader who is elected through Regional Head Elections (Pilkada) as a form of democracy. In the implementation of democracy, people have the right to vote so that people's actions in choosing someone who is used as a figure or driving actor in society tend to put aside their rationality. This action can occur because there is still a kinship system. In the study of political sociology, kinship systems can develop and be maintained as a form of the diversity of social beings that basically can develop political evolution. This study aims to analyze the kinship system in political practice in Bungur Village and to determine the impact of this system so that this study uses the theory of solidarity by Emile Durkheim as an instrument in analyzing the phenomenon being studied. In this study the method used was a qualitative descriptive approach to describe the results of data collection which was carried out through interviews with several residents and using literature studies in providing references for writing articles. The results of the study show that kinship system can affect political practice and the running of the government system which should run according to its function, as well as this is not recommended to be implemented because it is included in the act of nepotism.

Keywords: *Kinship System; Nepotism; Political Sociology; Solidarity Theory*

Abstrak (Font Time New Roman 11 Cetak Tebal)

Hubungan kekerabatan dapat mempengaruhi sistem pemerintahan dan praktik politik di setiap daerah yang berjalan selaras dengan fungsinya masing-masing. Setiap daerah memiliki pemimpin yang dipilih melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wujud dari adanya demokrasi. Pada penyelenggaraan demokrasi, masyarakat memiliki hak untuk memilih sehingga tindakan masyarakat dalam memilih seseorang yang dijadikan tokoh atau aktor penggerak di masyarakat cenderung menyampingkan rasionalitas mereka. Tindakan tersebut dapat terjadi karena masih adanya sistem kekerabatan. Dalam kajian sosiologi politik, sistem kekerabatan dapat berkembang dan dipertahankan sebagai bentuk dari keberagaman sifat makhluk sosial yang pada dasarnya dapat mengembangkan evolusi politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem kekerabatan pada praktik politik di Desa Bungur serta untuk mengetahui dampak dari adanya sistem tersebut sehingga penelitian ini menggunakan teori solidaritas oleh Emile Durkheim sebagai instrumen dalam menganalisis fenomena yang sedang dikaji. Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif untuk menggambarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara bersama beberapa warga serta menggunakan studi kepustakaan dalam memberikan referensi penulisan artikel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kekerabatan dapat berpengaruh pada praktik politik dan jalannya sistem pemerintahan yang sudah seharusnya berjalan sesuai dengan fungsinya, begitu pula hal tersebut tidak dianjurkan untuk diterapkan karena termasuk dalam tindakan nepotisme.

Kata Kunci: Nepotisme; Sistem Kekerabatan; Sosiologi Politik; Teori Solidaritas

Diajukan : 19 Maret 2025

Direvisi : 18 April 2025

Diterima : 7 Juni 2025

Pendahuluan

FISIP Universitas Tanjungpura
Teresiany Wulan Gultom

copyright JURMAFIS

Pada dasarnya desa merupakan susunan dari sistem pemerintahan negara ditingkat paling bawah atau terkecil yang melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam melayani masyarakat. Dalam melaksanakan aktivitas politik dan pemerintahan, desa berperan sebagai wadah untuk menampung segala partisipasi masyarakatnya yang sudah seharusnya desa dijadikan sebagai media dalam berinteraksi di bidang politik dimana hal tersebut merupakan wujud dari cerminan kehidupan berdemokrasi di negara Indonesia. Segala perkembangan dan pembangunan di daerah pedesaan mendapatkan perhatian yang cukup besar dari pemerintah karena sebagian besar penduduk berada di daerah pedesaan, maka dari itu dibutuhkan seseorang yang dapat berperan dalam merealisasikan visi misi desa, program yang telah dirancang sebagai bukti nyata untuk masyarakat dan hal yang fundamental untuk diterapkan kepada seseorang yang akan mendapatkan tugas tugas tersebut yaitu tidak merusak demokratisasi. Pada kenyataannya demokratisasi yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah masih terdapat tindakan kecurangan dalam berbagai bentuk, baik dalam bentuk politik uang, maupun adanya proses tawar menawar dan yang paling dapat merusak demokratisasi adalah adanya sistem kekerabatan yang menciptakan kekerabatan pada praktik politik di desa. Perlu diketahui jika kekerabatan politik dapat memberikan celah untuk nepotisme berperan kuat di masyarakat, dan munculnya hubungan patron-klien serta sistem penyaringan yang tidak transparan.

Masyarakat desa Bungur memiliki rasa kekeluargaan yang tinggi, hal tersebut sama halnya dengan besarnya korelasi dalam kekerabatan di ranah politik pada Pemilihan Kepala Daerah Desa Bungur Kabupaten Bojonegoro yang berdampak pada calon-calon dengan hubungan kekerabatan yang sedikit di masyarakat. Disamping itu, melihat calon yang memiliki program dan hal yang dapat mendukung kemajuan desa akan terhambat untuk maju menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Hal tersebut dapat dikarenakan oleh rendahnya taraf pendidikan di masyarakat sehingga membuat warga menjadi tidak objektif dalam memilih. Di satu sisi, masyarakat juga apatis sehingga dapat dimanfaatkan oleh calon-calon tertentu untuk mendapatkan jabatan yang diinginkan dengan memanfaatkan adanya otoritas politik. Calon-calon tertentu yang dimaksud yaitu mereka para elit desa yang ingin melancarkan otoritas dan kekayaannya agar dapat tersalurkan ke pihak-pihak bersangkutan yang masih memiliki hubungan kekerabatan di dalamnya. Sistem kekerabatan pada praktik politik merupakan permasalahan yang harus segera diatasi dengan cara pemberian sosialisasi kepada masyarakat desa mengenai aturan dasar dan hak-hak integritas dalam menjalankan demokratisasi, dengan begitu masyarakat dapat mengetahui sendiri mengenai visi misi yang akan dijalankan oleh calon kepala daerah mereka untuk menunjang kehidupan masyarakat yang lebih maju.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa merupakan suatu hal yang digunakan untuk mencari pemimpin terbaik yang kedepannya akan memiliki otoritas dan wewenang dalam mengendalikan segala pembangunan yang ada di desa sebagai kepala desa. Adanya penerapan regenerasi dalam bentuk model kekerabatan dapat dinilai bahwa masyarakat di daerah tersebut masih mempraktikkan model demokrasi konvensional. Dalam kajian sosiologi politik, sistem kekerabatan pada praktik politik dapat berkembang dan dipertahankan sebagai bentuk dari keberagaman sifat makhluk sosial yang pada dasarnya dapat mengembangkan evolusi politik. Sosiologi percaya bahwa kekerabatan pada praktik politik akan semakin mendominasi kehidupan masyarakat karena pada dasarnya masih mengutamakan ikatan

kerabat. Hal tersebut menimbulkan banyak pro dan kontra. Sebagian menganggap baik karena praktik politik dapat berjalan dengan stabil karena sistem dikerjakan bersama pihak-pihak terdekat dan sebagian menganggap tidak baik karena kekerabatan pada praktik politik hanya dijadikan sebagai instrumen dalam meneruskan otoritas yang dimiliki kepada beberapa pihak yang terikat. Di lain halnya sistem tersebut juga mengurangi kesempatan orang lain yang ingin menjadi kepala daerah karena sistem kekerabatan dalam praktik politik lebih banyak dalam mendapatkan dukungannya.

Kepala desa dengan kualitas dibawah standarisasi merupakan bukti nyata dari demokrasi yang tidak berjalan dengan lancar bahkan sudah rusak, dan hal tersebut karena maraknya sistem kekerabatan pada praktik politik di desa-desa. Nilai dan realitas dari demokrasi yang seharusnya berjalan sesuai dengan semestinya justru membuat masyarakat menjadi tidak terdidik sehingga sistem demokrasi menjadi disalahgunakan oleh oknum-oknum atau bahkan masyarakatnya sendiri yang apatis sehingga sistem demokrasi yang sudah berjalan dengan semestinya diterapkan kepada orang apatis yang tidak paham makna dari nilai demokrasi itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tujuan dari peneliti yaitu untuk melakukan penelitian mengenai dampak yang terjadi akibat adanya hubungan kekerabatan yang terjalin antara individu dengan individu maupun dengan kelompok pada praktik politik di Desa Bungur sehingga dalam melihat dan menilai fenomena yang terjadi dapat menggunakan teori solidaritas oleh Emile Durkheim. Masyarakat yang dikategorikan atas tingkat rasionalitasnya dalam memilih pemimpin di daerah mereka memunculkan rumusan masalah pada penelitian ini yang berdasarkan dari keadaan di masyarakat itu sendiri sehingga fenomena yang terjadi dapat berawal dari berbagai macam faktor, baik dari masyarakat maupun sistem dalam demokratisasi yang dianut. Rumusan masalah pada artikel ini yaitu bagaimana masyarakat ikut andil dalam menentukan pemimpin mereka yang diharapkan dapat memajukan dan memakmurkan desa, sehingga adanya sistem kekerabatan pada praktik politik yang dapat melahirkan tindakan nepotisme tidak lagi berkembang karena pada dasarnya masyarakat memiliki peran utama di Pemilihan Kepala Daerah. Disamping itu dampak yang dirasakan oleh masyarakat dapat menjadi hasil dari adanya pemberlakuan sistem kekerabatan yang dinilai dapat melahirkan tindakan nepotisme sehingga hal tersebut dapat menjadi rumusan masalah terhadap apa saja yang akan masyarakat terima dari dampak tersebut. Teori yang digunakan pada penelitian ini menyatakan bahwa korelasi secara individu maupun kolektif menggunakan rasa percaya yang berasal dari perasaan moral, maka dari itu diharapkan artikel ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lainnya mengenai bagaimana praktik politik yang terbentuk dari adanya sistem kekerabatan.

Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari subjek penelitian dengan mendeskripsikannya dalam bentuk kalimat. Pada konteks khusus yang bersifat alamiah dengan berbagai metode ilmiah, digunakan untuk mengeksplorasi fenomena di dalam sistem kekerabatan pada praktik politik. Adapun lokasi penelitian dalam penulisan artikel ini yaitu lingkungan Desa Bungur, Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan pertimbangan praktis. Alasan peneliti mengambil penelitian di tempat tersebut karena desa tersebut memiliki sistem kekerabatan dalam menentukan pemimpin serta perangkat yang membantunya.

Pada penelitian kualitatif, subjek yang digunakan dalam penelitian disebut dengan istilah informan yang merupakan sumber informasi mengenai data yang akan dibutuhkan peneliti. Subjek pada penelitian ini yaitu beberapa dari penduduk Desa Bungur yang ditentukan secara sampling dengan pemahaman informan yang memahami keinginan peneliti yaitu untuk mengetahui secara lebih dalam mengenai praktik politik dari sistem kekerabatan yang dijadikan sebagai penentu dari pemimpin serta perangkat desa. Peneliti juga dapat mengobservasi langsung dengan mengamati gejala sosial yang terlihat di lokasi penelitian sebagai bahan kajian dengan rujukan teori. Untuk memperkuat isi dari pembahasan, peneliti menggunakan studi literatur untuk mencari sumber data yang mendukung serta untuk mengetahui perkembangan dari sebuah penelitian yang dilakukan. Dalam menggunakan metode kualitatif, peneliti memiliki kebebasan dalam menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan agar dapat ditarik suatu kesimpulan.

Hasil dan Diskusi

1. Sistem Kekerabatan pada Praktik Politik Desa Bungur

Sistem kekerabatan di desa dapat dijalankan oleh aktor politik bersama kerabat-kerabat terdekatnya. Tanpa memandang hubungan kekerabatan dengan otoritas, sosiologi politik telah memunculkan suatu ikatan yang saling terikat kemudian memperlihatkan sistem dari adanya ikatan tersebut pada ranah politik di suatu daerah. Walaupun demikian, untuk membedakan hubungan antara kekerabatan dengan otoritas tidaklah mudah karena eratnya hubungan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat melalui adanya masyarakat tradisional yang selalu melaraskan hubungan kekerabatan dengan otoritas. Cara masyarakat tradisional mengkondisikan tata letak kewarganegaraan mereka sebagai warga desa dengan mendasarkan hubungan individu dengan kelompok yang disusun secara sistematis yang akan memiliki perbedaan dalam ketetapanannya. Kepala Desa yang telah mendapatkan legitimasi dari masyarakatnya sendiri melalui Pemilihan Kepala Daerah sudah menjadi kewajibannya dalam mengedepankan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil) oleh masyarakat desa setempat. Namun realita yang terjadi di lapangan masih terdapat rahasia yang dipegang.

Praktik politik di Desa Bungur dijalankan oleh kepala desa dan perangkatnya. Akan tetapi praktik politik yang dijalankan menganut sistem yang ada yaitu sistem kekerabatan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa aktor yang memiliki otoritas politik menjalankan sistem pemerintahannya bersama dengan kerabat dekat atau yang pada dasarnya sudah menjadi orang kepercayaannya. Seperti yang diketahui, sistem kekerabatan tersebut dapat melahirkan tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) pada tingkat desa. Hal tersebut diperkuat dari hasil wawancara dengan Ibu Dartik selaku mantan ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD). “Pada dasarnya jika seseorang sudah memiliki jabatan, ia akan sulit untuk menerima kritikan dari orang yang berani memberikan kritiknya. Ketika saya berani mengungkapkan adanya penyelewengan pada dana desa atau yang disebut dengan korupsi tidak lama jabatan atau peran saya sebagai ketua BPD hilang begitu saja dengan digantikan oleh pihak lain yang dapat dikatakan bahwa pengganti saya juga sudah diatur oleh kepala desa. Dari hal tersebut, saya pun tidak memiliki kekuatan untuk melawan tindakan yang semena-mena tersebut karena jajaran perangkat desa lainnya memiliki hubungan kekerabatan yang kental dengan kepala desa sehingga ketika ada tindakan yang menyeleweng dari kepala desa, mereka lebih

mengutamakan hubungan kekerabatan.” Dari hasil wawancara peneliti menyimpulkan sistem kekerabatan yang dijalankan melahirkan tindakan dan perilaku yang semena-mena serta dapat berpengaruh pada perspektif masyarakat terhadap cara kepala desa dalam memimpin suatu daerah. Maka dari itu, korupsi tidak hanya berasal dari gejala sosial dan budaya melainkan juga dari gejala politik yang ada. Antara teori dengan hasil wawancara menyimpulkan bahwa sistem kekerabatan pada praktik politik akan terdapat jabatan politik yang diberikan atas dasar hubungan kekerabatan. Hal tersebut dapat berpengaruh pada kesempatan orang lain dalam mendapatkan jabatan dan peran menjadi perangkat desa, serta tidak dipungkiri jika terdapat kepala desa berhasil meraih otoritas melalui legitimasi yang didapatkan dari masyarakat di suatu daerah, maka secara otomatis kerabat terdekat dari kepala desa juga menjadi pemegang sistem pemerintahan desa tersebut. Menganut aturan yang tercermin dalam nilai demokrasi di Negara Indonesia, sistem kekerabatan pada praktik politik tidak diperkenankan untuk diterapkan di negara kita karena secara tidak langsung termasuk pada tindakan nepotisme yang pada dasarnya tindakan tersebut sangat dilarang untuk diterapkan di Indonesia.

2. Hubungan Kekerabatan dalam Perspektif Teori Solidaritas

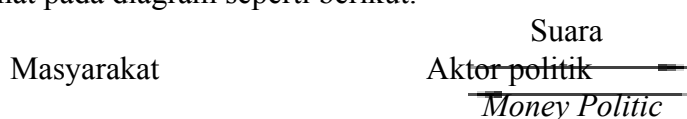
Menurut Emile Durkheim bentuk solidaritas terbagi menjadi dua yaitu solidaritas mekanik dan solidaritas organik. Perbedaannya terletak pada masyarakat pedesaan dan perkotaan. Dapat diketahui bahwa masyarakat pedesaan bersifat homogen dan perkotaan heterogen sehingga dapat mempengaruhi sistem yang ada. Pada pembahasan di ranah politik maupun pemerintahan, teori ini memandang bahwasanya terdapat cara untuk mempertahankan otoritas sesuai dengan caranya masing-masing. Ide dari Emile Durkheim sendiri didominasi oleh fakta sosial yang dapat dilihat dari seseorang dalam menerapkan sistem kekerabatan yang pada dasarnya hal tersebut sudah menjadi budaya hingga sekarang sehingga dapat dimaknai sebagai fakta sosial. Adanya tawaran dari pihak pemegang otoritas di pemerintahan desa yang dapat mempengaruhi seseorang juga menjadi faktor pendukung dari adanya fakta sosial. Penerapan sistem kekerabatan yang telah dianggap sebagai budaya telah tumbuh dan berkembang melalui habituasi sehingga stabilitas pemerintahan menjadi terganggu. Dalam memandang hubungan kekerabatan, individu cenderung mempertahankan integritas yang telah terjalin sebagai sesama kerabat dekat maupun jauh sehingga hal tersebut dapat membentuk jiwa solidaritas. Hal tersebut seperti pernyataan dari salah satu warga Desa Bungur yang menyatakan “namanya orang desa sama orang kota pasti ada perbedaan di berbagai aspek seperti halnya tentang hubungan kekerabatan yang kemudian nantinya membentuk rasa solidaritas sesama individu maupun kelompok. Sudah diketahui bahwa warga desa lebih menjunjung rasa kekeluargaan atau solidaritas sedangkan orang kota lebih ke individualis dan rasionalis. Maka dari itu tidak heran kalau masyarakat cenderung apatis karena tingkat rasionalisasi masyarakat desa berbeda dengan orang kota sehingga mereka pun abai dengan sistem pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa bersama perangkatnya.”

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa warga desa masih menjunjung tinggi hubungan kekeluargaan atau solidaritas yang dianggap akan berdampak ke masyarakat itu sendiri karena cenderung mengutamakan hubungan kekerabatan dibandingkan akibat yang akan muncul oleh adanya sistem kekerabatan tersebut. Timbulnya pro dan kontra dari sistem kekerabatan yang digunakan menjadi problematika di masyarakat karena beberapa menganggapnya sebagai bentuk dari rasa solidaritas dan beberapa ada yang menganggap dapat merusak demokratisasi dan sistem pemerintahannya. Hubungan kekerabatan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dapat menumbuhkan rasa saling percaya satu sama lain

sehingga tidak heran jika pemegang otoritas dan wewenang memberikan peluang besar kepada individu yang terjalin hubungan kekerabatan atas dasar rasa kepercayaan yang telah tumbuh sebagai bentuk dari hubungan positif mereka. Pada dasarnya, mendapatkan sebuah jabatan atau kedudukan yang berhubungan dengan birokrasi pemerintahan menggunakan hubungan kekerabatan disebut dengan tindakan nepotisme. Ikatan darah maupun ikatan sosial akan berpengaruh terhadap proses penyaringan perangkat desa sehingga dalam nilai moralitas dan hukum, aspek ikatan dalam kekerabatan tersebut dianggap memberikan kesan negatif dan dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Disamping itu, akan ada yang terdampak oleh sistem kekerabatan tersebut yaitu masyarakat. Berikut dampak yang terjadi pada masyarakat.

1. Timbulnya kecemburuan dan kesenjangan sosial.
2. Cenderung apatis oleh sistem yang dijalankan oleh pemerintahan desa dikarenakan masyarakat merasa pemerintahan sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya.
3. Tidak serius dalam mengembangkan potensi individu sehingga masyarakat yang lebih berpotensi cenderung dikesampingkan.
4. Hubungan kekerabatan dalam praktik politik sudah termasuk dalam tindakan nepotisme sehingga besar kemungkinan terjadinya tindakan korupsi dana desa yang sangat merugikan masyarakat.

Sosiologi politik memandang dampak yang berimbas pada masyarakat membentuk satu kesatuan dari awal mula berjalannya proses demokrasi di daerah tersebut yang kemudian membentuk hubungan timbal balik antara masyarakat dengan aktor politik (calon pemimpin daerah). Masyarakat sebagai pemegang suara dalam Pemilihan Kepala Daerah juga menjadi instrumen elit politik dalam memenangkan suara untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat sehingga dapat memegang otoritas di wilayahnya dan memiliki wewenang dalam pembangunan daerah. Disamping itu masyarakat harus memahami visi dan misi calon pemimpin daerah mereka yang nantinya proses pembangunan untuk masyarakat dapat direalisasikan sehingga masyarakat mendapatkan manfaatnya. Melalui adanya penyampaian visi dan misi kepada masyarakat, calon-calon pemimpin yang berambisi memenangkan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah banyak yang masih menggunakan money politic (politik uang) sebagai bentuk permintaan suara kepada masyarakat sehingga penyampaian visi dan misi serta program kerja yang telah dijanjikan seakan tidak cukup untuk meyakinkan masyarakat akan memberikan suaranya. Hal tersebut dapat digolongkan pada tindakan gratifikasi yang merupakan tindakan tidak benar. Setiap tindakan yang merupakan faktor penyebab, akan ada akibat yang diterima oleh beberapa pihak seperti masyarakat seperti dana pembangunan yang dikorupsi oleh pemimpin terpilih. Adanya tindakan korupsi tersebut merupakan akibat dari tindakan masyarakat yang mau menerima money politic (politik uang) yang pada dasarnya masyarakat telah ikut andil dalam tindakan gratifikasi yang kemudian menjadi tindak pidana korupsi dana desa. Satu kesatuan yang kemudian membentuk hubungan timbal balik telah dijelaskan melalui sudut pandang sosiologi politik di atas dapat dilihat pada diagram seperti berikut.



Dari diagram di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan timbal balik antara FISIP Universitas Tanjungpura
Teresiany Wulan Gultom

copyright JURMAFIS

masyarakat dengan aktor politik yang dijadikan sebagai calon pemimpin daerah. Hubungan timbal balik tersebut menggambarkan peran masyarakat dalam memberikan suara kepada aktor politik (pemimpin daerah) yang kemudian terjadinya transaksi politik uang untuk masyarakat. Adanya politik uang tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya suara rakyat dapat dibeli untuk kepentingan oligarki semata dimana oligarki pun juga akan mendapatkan keuntungan dari kemenangan yang akan didapatkan dari aktor politik yang diusung oleh mereka. Namun pada kenyataannya, di tempat yang menjadi penelitian ini bukan pihak oligarki yang akan memegang otoritas dan kendali, melainkan aktor politik yang akan mengarahkan roda pemerintahannya bersama perangkat desa lainnya yang telah diberikan peluang besar melalui sistem kekerabatan.

Pada pembahasan penelitian ini, dasar teori yang telah dijelaskan dapat memberikan gambaran bahwa sistem pemerintahan yang berjalan di Desa Bungur belum berjalan secara optimal dan sesuai dengan prosedur yang ada melihat dari berbagai permasalahan yang terjadi di pemerintahan Desa Bungur sehingga mendapatkan perhatian dari Lembaga Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (LPIPRB). Ketua LPIPRB, Manan menyatakan “persoalan di Desa Bungur sebaiknya segera diselesaikan agar tidak berkepanjangan sehingga hubungan antara pemerintah desa dan lembaga yang ada dapat terjalin secara harmonis”. Meninjau dari pernyataan tersebut, sangat perlu untuk melakukan perbaikan dalam menegakkan sistem pemerintahan yang bersih (clean government), maka dari itu masyarakat sebagai alat kontrol sosial harus dapat membentuk komitmen bersama dalam mewujudkan aparat publik yang mampu berintegrasi serta mengikutsertakan masyarakat pada proses berjalannya roda pemerintahan yang ada di desa.

Pada kerangka teori yang telah dijelaskan diatas cukup menjelaskan sistem kekerabatan yang berpengaruh pada praktik politik dan proses birokrasi di pemerintahan desa sehingga membutuhkan partisipasi masyarakat dalam berperan sebagai alat kontrol sosial di masyarakat. Peran masyarakat sebagai alat kontrol sosial diharapkan dapat mempengaruhi kebijakan publik dalam upaya menuju sistem pemerintahan yang bersih (clean government). Dengan mengubah struktur pemerintahan dan sistem penggerak lingkungan sosial, akan dapat mengubah pola korupsi yang terdapat di dalam administrasi pemerintahan. Peran masyarakat disini diharapkan dapat menjadi instrumen kehidupan sosial dengan menjunjung tinggi nilai dan norma manusia serta mengedepankan semangat demokratis sehingga tidak menjadi masyarakat yang apatis. Untuk mencapai tujuan dan kebaikan bersama, masyarakat bekerjasama dalam membangun jaringan sosial yang membentuk solidaritas bersifat non-governmental sehingga hubungan yang terjalin antara masyarakat dengan pemerintahan memiliki unsur konstitutif. Maka dari itu, perlu meningkatkan peran masyarakat sebagai instrumen yang dapat menyeimbangkan pengawasan pada praktik politik dan sistem birokrasi mengingat peran dari pejabat desa masih lemah dalam menegakkan hukum dan sistem yang berlaku.

Kesimpulan

Hubungan kekerabatan yang berjalan dengan baik dapat melahirkan output di segala aspek seperti halnya dalam politik. Birokrasi maupun organisasi hingga saat ini masih mengutamakan hubungan kekerabatan yang telah terjalin secara baik sehingga berpotensi pada terjadinya tindakan korupsi dan nepotisme. Bentuk kekerabatan di Desa Bungur dapat dikatakan kesatuan kerabat yang melakukan interaksi antar sesama di waktu tertentu, jadi pada praktik politik terjadi pengkaderan yang akan diisi oleh kerabat-kerabat terdekat dari pimpinan desa. Peran dari sesama kerabat sudah diketahui secara jelas mengenai tugas mereka yaitu menyukseskan dalam memengaruhi warga sekitar agar memilih

kerabat yang akan dijadikan sebagai kepala desa sehingga dapat memiliki kekuasaan di daerahnya. Hal tersebut tentunya akan memunculkan timbal balik antara kedua peran. Kerabat yang membantu mensukseskan akan mendapatkan peran dalam menjalankan sistem pemerintahan di desa dan kepala desa yang sudah terpilih dapat memegang kekuasaan dan wewenang pada daerah tersebut.

Adanya sistem kekerabatan yang digunakan tersebut tentunya merugikan masyarakat lainnya sehingga hubungan kekerabatan pun menjadi menimbulkan efek negatif. Teori solidaritas menilai bahwasanya masyarakat desa cenderung menjunjung tinggi nilai kekeluargaan sehingga menyampingkan rasionalitas mereka dalam melibatkan diri pada situasi politik yang sedang terjadi di masyarakat sehingga masyarakat sendiri pun akan terkena dampaknya, maka dari itu masyarakat sebagai komponen utama dalam menegakkan demokratisasi di daerah juga harus dapat mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dengan melibatkan orang-orang berkualifikasi bagus, bukan mengandalkan hubungan kekerabatan satu sama lain dalam menjalankan suatu pemerintahan di daerah.

Referensi

- Adelina, F., & Karno, U. B. (2019). *BENTUK-BENTUK KORUPSI POLITIK*. 16.
- Ameliah, N. (n.d.). *KEBIJAKAN ANTI NEPOTISME DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN*.
- Arisandi, R. S. (n.d.). *Praktik Politik Nepotisme dalam Pemilihan Walikota*.
- Dillon, H. (2010). *PERMASALAHAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME DI DAERAH*. 1.
- Gunanto, D. (2020). Tinjauan Kritis Politik Dinasti di Indonesia. *Sawala : Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 177–191. <https://doi.org/10.30656/sawala.v8i2.2844>
- Haboddin, M. (2010). Homogenitas Wajah Birokrasi di Aras Lokal. *Jurnal Desentralisasi*, 8(5), 43–54. <https://doi.org/10.37378/jd.2010.5.43-54>
- Hidayati, N. (2014). *DINASTI POLITIK DAN DEMOKRASI INDONESIA*. 10(1).
- Hijjang, P., & Amelia, L. (2019). Assajingeng: Politik Kekerabatan di Pilkada Kabupaten Bone (Analisis Antropologi Politik). *Jurnal Socius: Journal of Sociology Research and Education*, 6(2), 121. <https://doi.org/10.24036/scs.v6i2.161>
- Junaidi, K., & Lestari, T. (2021). PERAN KEKERABATAN DALAM PEMENAGAN PEMILIHAN KEPALA DESA MENJALIN TAHUN 2018. *JURNAL SOCIOPOLITICO*, 3(2), 88–96. <https://doi.org/10.54683/sociopolitico.v3i2.43>
- Martiningsih, D. (2017). Peran Masyarakat Madani Mewujudkan Clean Government (Pemerintahan Yang Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme). *PUSAKA*, 5(2), 201–218. <https://doi.org/10.31969/pusaka.v5i2.180>
- Tinov, M. Y. T., & Wicaksono, B. (n.d.). *ANALISIS SISTEM PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI RIAU*.
- Yhasmid, N. F. (n.d.). *SISTEM KEKERABATAN DAN LITERASI POLITIK TERHADAP KEPEMIMPINAN PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN PATAMPANUA*.
- Yusup, A. (n.d.). *KEKERABATAN POLITIK DESA TORUKUNO DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH MOROWALI TAHUN 2018*.